

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di zaman yang semakin maju ini, penyelenggara layanan jasa merupakan salah satu perusahaan yang banyak digemari. Salah satunya adalah layanan di bidang kesehatan yaitu rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit Republik Indonesia yang menjelaskan rumah sakit merupakan lembaga sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki karakteristik khas dipengaruhi perkembangan pengetahuan ilmu kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus terus bisa meningkatkan mutu pelayanan dan terjangkau oleh masyarakat agar bisa tercapai derajat kesehatan yang tinggi. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang perumahsakititan menjelaskan bahwa rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan perorangan secara lengkap yang menyediakan perawatan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit adalah organisasi nirlaba atau perusahaan layanan jasa kesehatan yang tidak berorientasi pada laba (Manik dkk, 2022). Perusahaan nirlaba atau non profit biasanya menggunakan pendapatan dari jasa pelayanan yang diberikan untuk menunjang kelangsungan operasional usahanya agar terus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyediakan layanan yang baik melalui

instrument yang handal adalah tuntutan yang wajib dipenuhi rumah sakit agar mampu bertahan di tengah pelayanan publik.

Reformasi undang-undang keuangan di Indonesia menghasilkan beberapa perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara, diantaranya adalah hadirnya model pengelolaan keuangan baru yang diperuntukan kepada lembaga pemerintahan yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa kepada masyarakat secara langsung, model pengelolaan keuangan tersebut adalah Badan Layanan Umum / Daerah (BLU/D). Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa, Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menggunakan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur oleh PP ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Salah satu alasan munculnya pola Badan Layanan Umum (BLU) karena adanya paradigma bahwa lembaga pemerintahan, sebagai penyedia layanan masyarakat selama ini tidak diberi keleluasaan dalam mengelola keuangan (Farwitawati, 2020). Semua pendapatan instansi harus diserahkan terlebih dahulu ke kas negara sebagai PNBK kemudian instansi harus mengajukan rencana anggaran untuk dapat mencairkan dana tersebut. Sehingga terdapat opini yang menyatakan pengelolaan instansi tidak

dapat dimaksimalkan karena ada banyak potensi pemasukan yang tidak dapat langsung digunakan.

Pengelolaan Keuangan BLUD bertujuan untuk meningkatkan kinerja pada pelayanan publik yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kriteria BLUD yang akuntabel salah satunya adalah dengan laporan keuangan yang berkualitas, Kualitas Laporan Keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menjelaskan laporan keuangan BLU rumah sakit dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi laporan keuangan yang menyangkut posisi keuangan, informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu satu periode, informasi kas berhubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan, serta informasi penjelasan yang rinci dari angka yang ada pada laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan juga disampaikan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.

Laporan Keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penggabungan Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, setiap semester dan setiap tahunan BLUD wajib menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan lengkap

yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk digabungkan ke dalam laporan keuangan pemerintah Daerah, paling lambat 2(dua) bulan setelah periode pelaporan selesai. Penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasi dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak adalah rumah sakit tipe B yang berada di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan BLUD, RSUD Dr Iskak ditetapkan sebagai Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh berdasarkan keputusan Bupati tulungagung Nomor: 188.45/554/031/2008 tanggal 31 Desember 2008.

Pada tahun 2021 hasil penilain GCG yang dilakukan BPKP terhadap RSUD dr Iskak mendapat nilai sebesar 80,90 dengan predikat “Baik” dalam kategori “AA”. Selain itu meskipun berstatus sebagai BLUD dengan proporsi penuh 100 persen pelayanan, RSUD dr Iskak pada tahun 2021 membukukan total pendapatan sebesar Rp 711,49 miliar, jauh diatas target Rp 380,79 miliar. Realisasi pendapat tersebut meningkat pesat ketimbang tahun 2020 yang meraih pendapatan Rp 355,73 miliar, diatas target Rp 300,09 miliar. Hasil pemeriksaan kantor Akuntan Publik dan BPK provinsi Jawa Timur terhadap kinerja keuangan RSUD dr Iskak tahun 2021 sama-sama mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Aini dkk (2022) didapatkan permasalahan yang ingin penulis lakukan analisa lebih lanjut terkait belum optimalnya pengembangan teknologi informasi di RSUD dr Iskak Tulungagung. Pemanfaatan teknologi informasi menyokong adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang menghubungkan seluruh unit pelayanan yang ada di rumah sakit, salah satunya belum terintegrasinya layanan informasi dengan bagian back office khususnya keuangan. Terdapat tiga permasalahan yang berhubungan dengan teknologi informasi, yang pertama berhubungan dengan indikator brainware yaitu kapasitas tenaga IT belum mencukupi. Kedua indikator software yaitu aplikasi SIMRS belum mengakomodasi semua kebutuhan pengguna. Ketiga berhubungan dengan indikator hardware yaitu (selain komputer untuk masing-masing unit) belum mencukupi.

Menurut Aminy dkk (2022) pengelolaan keuangan negara harus sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, dimana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan harus diterapkan tata kelola keuangan dengan baik dan benar. *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga sinergitas interaksi yang membangun diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN RI,2004:25). Pada penjelasan Sedarmayanti (2012:7) dengan adanya *rule of law* sebagai bentuk karakteristik pemerintahan yang baik, akan memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap adanya kebijakan publik.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) pada rumah sakit biasanya sering disebut dengan *good hospital governance* (GHG) atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai sistem tata kelola rumah sakit. Konsep ini sama dengan tata kelola perusahaan pada umumnya, tetapi ada penyesuaian pada aplikasinya pada layanan kesehatan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Pasal 36 dijelaskan bahwa rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Hal ini menggambarkan maksud dari penerapan sistem tata kelola rumah sakit di setiap rumah sakit agar mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal.

Hasil penelitian Mulyanti & Rahma (2020) menunjukkan hasil pengujian yang dilakukan, penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Penelitian yang dilakukan Safitri dkk. (2021) berpendapat tata kelola perusahaan secara parsial mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun pada penelitian (aminy dkk, 2021) menunjukkan penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Mulyati dkk. (2019) dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya pengendalian internal atas laporan keuangan guna mencegah berbagai masalah yang bisa terjadi akibat dari lemahnya pengawasan serta

pengendalian untuk menghasilkan informasi atas laporan keuangan. Selain itu BPK (2018:3) menjelaskan terdapat tiga kelemahan pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yakni kelemahan pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yakni kelemahan pengendalian yang berhubungan dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
3. Kelemahan struktur pengendalian internal, yaitu kelemahan yang berhubungan dengan ada tidaknya struktur pengendalian internal atau efektivitas struktur pengendalian internal; yang ada di dalam entitas yang diperiksa.

Tingkat kualitas suatu laporan keuangan bisa ditentukan dengan seberapa baik pengendalian internal pada perusahaan itu sendiri (Ernawati & Budiyo,2019). Apabila tingkat pengendalian itu rendah atau lemah maka dalam pendeteksian adanya kecurangan pada penyusunan laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang didapatkan perusahaan dari informasi data akuntansi tidak akan kompeten. Adanya sistem pengendalian pada perusahaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua peluang terjadinya sebuah kesalahan dan kecurangan pada batas-batas yang bisa dianggap layak, dan seandainya terjadi hal tersebut bisa segera diketahui dan diselesaikan.

Hasil penelitian Ernawati & Budiyo (2019) menunjukkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan artinya semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan akan menyebabkan sistem pengendalian internal semakin baik dan meningkat. Penelitian yang dilakukan Anni dkk. (2021) berpendapat tata kelola perusahaan secara parsial mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pada penelitian Mulyati dkk. (2019) antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan berpengaruh memiliki hubungan kearah positif. Namun pada penelitian anni dkk.( 2021) menunjukkan sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Memasuki era revolusi Industri 4.0 peran teknologi informasi guna mendukung operasional dan manajemen pemerintahan berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah. Pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dijelaskan penyelenggaraan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan pengembangan layanan publik. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk membantu manusia mengelola data, berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan dan menyebarkan informasi dalam berbagai cara guna menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan

pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Tampubolon & Basid, 2019).

Menurut Rachmawati & Anik (2020) teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menghasilkan sistem informasi organisasi yang tangguh dan mampu unggul secara kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat. Semakin majunya perkembangan teknologi pada saat ini, instansi-instansi pemerintah sudah mulai beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi. Kendala yang sering terjadi dalam penerapan teknologi informasi yakni berhubungan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang dipergunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada dan keterbatasan dana yang dimiliki. Kendala tersebut yang menjadi penyebab pemanfaatan teknologi belum optimal karena masih sedikitnya web pemerintahan yang update terkait informasi keuangannya.

Fenomena-fenomena yang telah dibahas serta ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menjadi alasan dan motivasi dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menguji kembali determinan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada RSUD dr Iskak Tulungagung. Keterbaruan penelitian ini yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: (1) objek yang digunakan adalah RSUD Dr Iskak Tulungagung yang sudah BLUD, sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor instansi Pemerintah Daerah. (2) pengujian variabel *Good Governance* jarang diuji, terutama pada instansi rumah sakit.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Secara lebih khusus rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan meneliti pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Mengetahui dan meneliti pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Mengetahui dan meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sejumlah tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, peneliti berharap bisa memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan bisa digunakan menjadi referensi atau rekomendasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang sangat tertarik pada bidang akuntansi sektor publik khususnya pada kementerian atau lembaga BLU/BLUD yang berkaitan dengan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah kabupaten Tulungagung, Karyawan RSUD Dr Iskak Tulungagung sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengetahui arti penting tata kelola perusahaan, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi sehingga dapat mendorong kualitas laporan keuangan RSUD Dr Iskak Tulungagung.